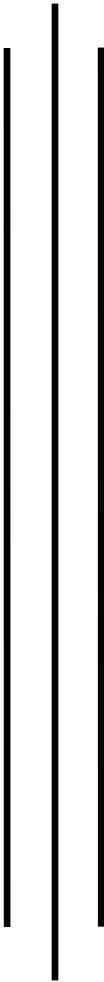


LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG TAHUN 2027





RENJA TAHUN 2027

DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



AIR BERSIH DAN
AIR LIMBAH DOMESTIK



PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG



RENCANA
TATA RUANG



BINA
KONSTRUKSI



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Dokumen Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 22 Juli 2026

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19730408 200212 1 005



DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah	2
1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 9
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan tahun 2025...	9
2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..	9
2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..	10
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12
2.3. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan minimal (SPM).....	15
2.4. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	16
2.4.1. Rumusan Permasalahan.....	16
2.4.2. Isu Strategis Tahun 2027	19
2.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	20
2.6. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	21
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 23
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
3.2. Arah dan Kebijakan	24
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 25
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan Tahun 2027	25
4.2. Dukungan Program RKPD 2027 untuk program Nasional dan Program Provinsi	35
 BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 38
5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	40
5.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	41
 BAB VI PENUTUP.....	 43
6.1. Catatan Penting	43
6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	43
6.3. Rencana Tindak Lanjut	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Pencapaian atas Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Tabel 2.2	:	Pencapaian atas Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025
Tabel 2.3	:	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Tabel 2.4	:	Pencapaian atas Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025
Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027
Tabel 4.1	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tabel 4.2	:	Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan
Tabel 4.3	:	Pendukung Program Strategis Nasional
Tabel 4.4	:	Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tabel 4.5	:	Pendukung Prioritas Nasional
Tabel 4.6	:	Pendukung Prioritas Presiden RI
Tabel 4.7	:	Pendukung Standar Pelayanan Minimal
Tabel 4.8	:	Pendukung Program Percepatan Penurunan Stunting
Tabel 5.1	:	Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 5.2	:	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tabel 5.3	:	Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD
Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja Tahun 2027 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Penyusunan Renja dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), sehingga mampu mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, serta menghasilkan dokumen perencanaan yang terukur, akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027. Renja menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 sehingga penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, penataan bangunan gedung, pembinaan jasa konstruksi, serta penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum meratanya pelayanan air minum terutama di wilayah hinterland, belum optimalnya pelayanan air limbah domestik, meningkatnya kebutuhan infrastruktur permukiman seiring pertumbuhan penduduk dan investasi, perlunya peningkatan kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang adaptif, terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan pembangunan.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026, penyusunan Renja Tahun 2027 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Program Strategis Nasional, serta isu-isu strategis pembangunan daerah. Sinkronisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, efisien, efektif, dan akuntabel. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 serta instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan bidang cipta karya dan penataan ruang di Kota Batam.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

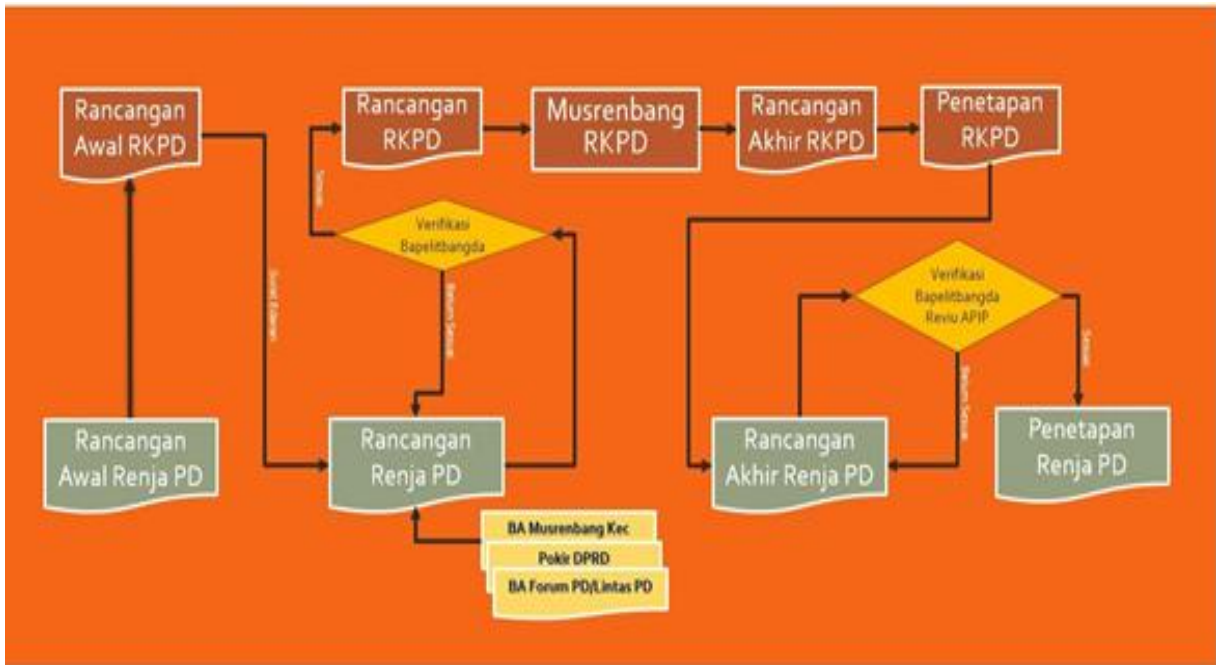
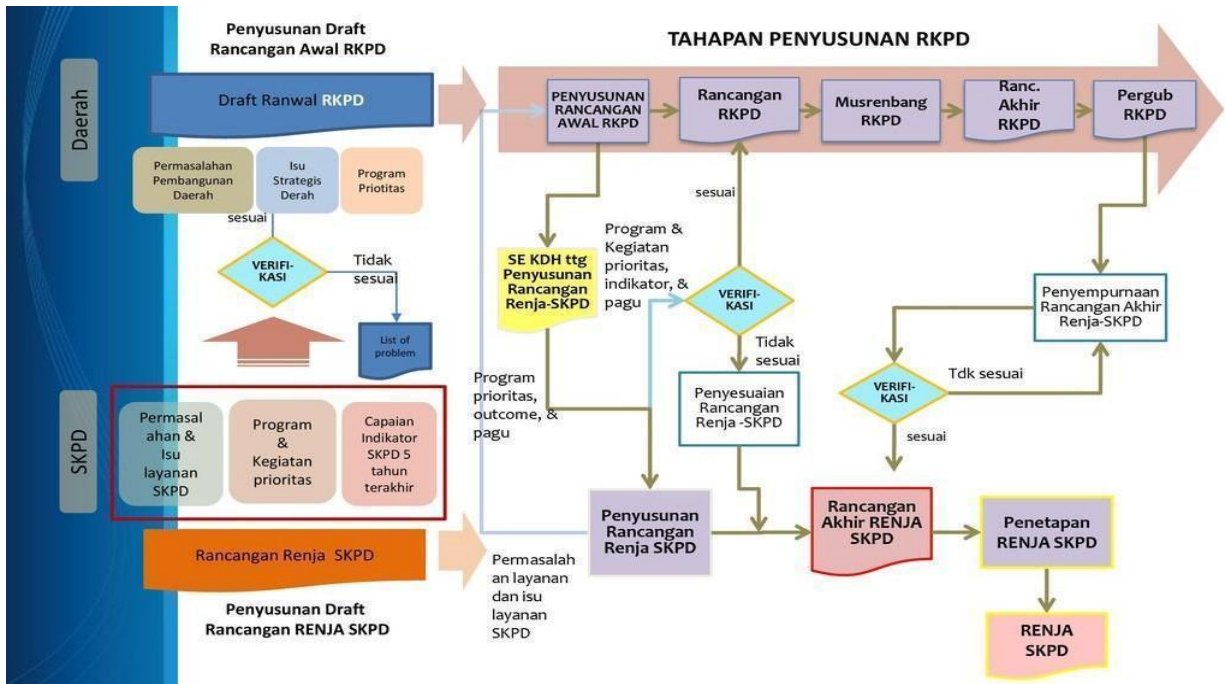
Dokumen Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Dokumen Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Renja
- c. Penyusunan Rancangan Dokumen Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Dokumen Renja
- f. Penetapan Dokumen Renja.

Dokumen Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.



Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan RKPD



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen



Gambar 1.2
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan



- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
 19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1096);
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130); dan
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136).
 23. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
 24. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042;
 25. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042;
 26. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042;
 27. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam;
 28. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2025, Tentang Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2025-2029.
 29. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2026, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah untuk menjadi acuan tahunan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang sejalan dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam, serta kebijakan nasional dan provinsi, jika dirincikan secara detail adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman kerja tahunan bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan terarah, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan antara kebijakan pusat, provinsi, dan Kota Batam, khususnya di bidang cipta karya, infrastruktur perkotaan, penataan bangunan, dan tata ruang;
- c. Menjabarkan sasaran dan strategi Renstra ke dalam program dan kegiatan tahunan yang lebih operasional, sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran;
- d. Mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Batam melalui kontribusi nyata sektor cipta karya dan tata ruang, seperti peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan ruang yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas umum dan lingkungan hidup yang layak;
- e. Sebagai dasar penyusunan anggaran (RKA-SKPD) agar penggunaan sumber daya keuangan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam antara lain:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional agar mudah diimplementasikan sesuai prioritas pembangunan daerah;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di bidang cipta karya dan tata ruang secara terukur, berdasarkan permasalahan, isu strategis, serta aspirasi masyarakat;
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam, sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan SKPD dan perencanaan daerah;
- d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran, dengan merencanakan program/kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah;
- e. Mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur perkotaan, penataan ruang, dan lingkungan yang berkelanjutan, aman, dan nyaman bagi masyarakat;
- f. Menyediakan arah kebijakan tahunan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, agar setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas;
- g. Memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kota dalam bidang pembangunan infrastruktur, perumahan, permukiman, serta tata ruang wilayah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Menguraikan Latar Belakang Penulisan
- 1.2. Dasar Hukum



	1.3. Maksud Dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025
	2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	2.3. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	2.4. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
	2.5. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD
	2.6. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.2. Arah dan Kebijakan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Tahun 2027
	4.2. Dukungan Program RKPD 2027 Untuk Program Nasional Dan Program Provinsi
BAB V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
	5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
	5.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BAB VI	PENUTUP
	6.1. Catatan Penting
	6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
	6.3. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja Bidang Urusan Tahun 2025 dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta memberikan gambaran terhadap efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pengukuran kinerja dilakukan melalui tiga kelompok indikator, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025–2029. IKK digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun indikator kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, kendala yang dihadapi, serta peluang perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Evaluasi kinerja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan 2 (dua) kelompok indikator, yaitu:

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. IKU disusun sebagai instrumen pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025–2029.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2027, IKU menjadi acuan utama dalam merumuskan program, kegiatan, subkegiatan, serta target kinerja tahunan. Penetapan target dilakukan berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, proyeksi kebutuhan pembangunan, kemampuan pendanaan daerah, serta arah kebijakan pembangunan tahun 2027. Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, penataan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, serta tata kelola perangkat daerah. Pengukuran capaian dilakukan secara berkala melalui pemantauan dan evaluasi terhadap indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun IKU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2027 meliputi :



Tabel 2.1.
Pencapaian atas Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang	Indeks	78.43	81.76	104.25%
2	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik.	Persentase	55.28	55.92	101.16%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Nilai	90.81	90.81	100.00%
4	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase	83.00	92.27	111.17%
5	Rasio kepatuhan PBG	Rasio	97	97.10	100.10%

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik. Sebagian besar target IKU dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, penataan bangunan gedung, penataan ruang, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta meningkatnya sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan para pemangku kepentingan

2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. IKK digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029 serta selaras dengan indikator kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan capaian utama penyelenggaraan urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, meliputi peningkatan cakupan pelayanan air minum layak, pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, peningkatan kualitas penataan ruang, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik secara efektif dan akuntabel.

Hasil pengukuran IKK menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Indikator Kinerja Kunci tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan organisasi, tetapi juga menjadi



instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.2.

Pencapaian atas Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi	Persentase	52,92	53,02	100,19%
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	57,64	58,81	102,03%
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persentase	96,82	97,1	100,29%
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi perator/teknisi/ analis	Persentase	33,33	21,46	64,39%
5	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan peraturan perundang undangan	Persentase	27,27	9,09	33,33%
6	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/ non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/ dilayani Pemerintah Daerah	Hari	12	33	36,36%
7	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persentase	40	0	0,00%

Dari aspek Indikator Kinerja Kunci (IKK), pelaksanaan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, yang menjadi kewenangan perangkat daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Capaian IKK mencerminkan meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan, terutama yang berkaitan dengan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025, secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar indikator mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa indikator melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang penyediaan air minum dan air limbah domestik, bangunan gedung, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, terutama dalam peningkatan Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis, Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan peraturan perundang undangan, Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah dan Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran



Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota. Kondisi tersebut disebabkan karena selama Tahun 2025 tidak terdapat kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah memenuhi tahapan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penanganan terhadap indikasi pelanggaran masih berada pada tahap pengawasan, verifikasi lapangan, koordinasi lintas instansi, dan pembinaan kepada para pihak, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai kasus yang selesai. Rendahnya capaian indikator ini tidak serta merta menunjukkan rendahnya pelaksanaan fungsi pengawasan pemanfaatan ruang, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik indikator yang mengukur jumlah kasus yang berhasil diselesaikan hingga tuntas. Proses penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang memerlukan tahapan administrasi, klarifikasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang

2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana Tabel 2.1.3. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Tidak ada program/kegiatan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik yaitu 100% realisasi mencapai 100,01% dengan selisih 100.01 %
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota dari target fisik yaitu 52,92% realisasi mencapai 53,02% dengan selisih 100.19 %
 - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dari target fisik yaitu 57,64% realisasi mencapai 58,81% dengan selisih 102.03 %
 - d. Program Penataan Bangunan Gedung dari target fisik yaitu 16,67% realisasi mencapai 82,50% dengan selisih 114.52 %
 - e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari target fisik yaitu 16,67% realisasi mencapai 21,46% dengan selisih 128.73 %



- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dari target fisik yaitu 15,07% realisasi mencapai 20,31% dengan selisih 134.77 %
3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
- a. Melaksanakan Pengawasan yang kontinue dalam pelaksanaan program/kegiatan.
 - b. Adanya komitmen bersama di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur.
 - c. Adanya sinergitas antar bidang di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
 - d. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana public dan masyarakat umum menjadi lebih representative.
 - e. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan pembangunan gedung pemerintah dan masyarakat dapat segera dilaksanakan.
- Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu : karena adanya kendala di peraturan tentang aturan pembayaran tabungan perumahan rakyat (tapera)
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah terciptanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana dan prasarana milik pemerintahan Kota Batam yang memadai di kota Batam.
- Evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	52.92 %	53.02 %	100.19%	54.57 %	55.44 %	101.59 %
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disuply Pemerintah Kota Batam	1,300 jiwa	1,960 jiwa	102.03 %	1.000 jiwa	1,456 jiwa	145.60 %
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik (Dengan Satuan:Persentase	57.64 %	58.81 %	102.03%	58.96 %	59.88 %	101.56 %
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK (Dengan Satuan jiwa)	532 jiwa	532 jiwa	100.00 %	800 Jiwa	160 Jiwa	20.00 %
1.03.01		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan : Poin)	90,81	90,82	100.01%	90.84 %	90.82 %	99.98 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Angka)	70,09	70,09	100.00%	74.33	70,09	94.30 %
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	-	-	-	100%	50%	100%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	100 %	100 %	100 %	51.57 %	51.57 %
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data BMD dalam KIB (Dengan Satuan:Persentase)	-	-	-	100 %	-	-
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	-	-	-	100 %	0 %	0 %
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	100 %	100 %	100 %	67.06 %	67.06 %
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	49.95 %	49.95 %
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	49.21 %	49.21 %
1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan	52.92 %	53.02 %	100.19 %	54.57 %	55.44 %	101.59 %
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang (Dengan Satuan:Persentase)	15.07 %	20.31 %	134.77 %	32.05 %	35.67 %	111.29 %
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	402 Dokumen	543 Dokumen	135.07 %	403 Dokumen	280 Dokumen	69.480 %
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Dalam Sosialisasi Publik (Dengan Satuan : Orang)	-	-	-	50 orang	-	-
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Dokumen Hasil Monev Wilayah Perencanaan (Dengan Satuan : Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan : Dokumen)	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	0%
1.03.08	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	16.67 %	19.09 %	114.52 %	33.33 %	32.42 %	33.33 %
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Unit Bangunan Daerah Yang Ditangani (Dibangun, Dipelihara, Direhabilitasi/Revitalisasi dan Diawasi (Dengan Satuan : Unit)	440 unit	504 unit	114.55 %	440 unit	352 unit	80 %
1.03.11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	16.67 %	21.46 %	128.73 %	33.33 %	47.21 %	141.64 %
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	9.09 %	9.09 %	100 %	27.27 %	14.36 %	52.66 %
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	400 orang	515 orang	128.75 %	400 orang	618 orang	154.50 %
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan : Laporan	-			100 Laporan	29 Laporan	29.00 %

Secara umum, capaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Program pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, penataan bangunan gedung, pembinaan jasa konstruksi, serta penataan ruang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Renja Tahun 2027, baik dalam penyempurnaan target indikator kinerja, penetapan prioritas program dan kegiatan, maupun pengalokasian sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan Renja Tahun 2027 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pencapaian target RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil

2.3. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah mengacu pada ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada bidang Pekerjaan Umum yang meliputi pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Renja Tahun 2027 guna memastikan kesinambungan pencapaian target pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tabel 2.4.

Pencapaian atas Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Satuan	Target Tahun-			Realisasi Tahun-		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari;	Rumah Tangga	300	223	325	300	223	325
2	Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	100	80	166	100	80	166

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, pelaksanaan SPM telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana air minum serta air limbah domestik, terutama pada kawasan yang menjadi prioritas pelayanan. Pembangunan jaringan perpipaan, optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi infrastruktur, serta pengembangan layanan sanitasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan ketersediaan sumber air baku di beberapa wilayah, belum meratanya cakupan pelayanan pada kawasan hinterland, keterbatasan kapasitas infrastruktur eksisting, keterbatasan pendanaan pembangunan, serta perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian target SPM. Sebagai tindak lanjut atas hasil



evaluasi tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada Renja Tahun 2027 mengarahkan kebijakan untuk:

- meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dan aman, khususnya di wilayah hinterland;
- memperluas akses pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai target SPM;
- mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan;
- memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan pelayanan dasar;
- meningkatkan sinergi pendanaan melalui APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya guna mempercepat pencapaian target SPM.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar sehingga target SPM sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat tercapai secara optimal

2.4. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Rumusan permasalahan dan isu strategis merupakan hasil identifikasi terhadap berbagai kondisi yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, baik yang bersumber dari hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun dinamika pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 dan perkembangan kondisi pembangunan, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pada bidang penyediaan air minum, cakupan pelayanan air minum layak belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, khususnya kawasan hinterland. Keterbatasan sumber air baku, kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta kebutuhan pengembangan jaringan perpipaan menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

2.4.1. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan menjadi dasar dalam penetapan isu strategis, arah kebijakan, serta prioritas program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada Renja Tahun 2027, sehingga sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Rumusan permasalahan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian kinerja perangkat daerah, pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029, serta hasil analisis terhadap dinamika pembangunan daerah dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Rumusan permasalahan ini menjadi dasar dalam penetapan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renja Tahun 2027 agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun rumusan dari permasalahan tersebut adalah :



No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
1	Belum Optimalnya Pelayanan Air Bersih di Wilayah Hinterland	1. Permasalahan dan Hambatan Internal a. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan - Anggaran daerah terbatas untuk membangun infrastruktur air bersih di pulau-pulau kecil. - Belum ada pola kerjasama optimal dengan pihak swasta atau lembaga donor. b. Keterbatasan Infrastruktur - Belum tersedia jaringan perpipaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah hinterland. - Ketergantungan pada sumur gali atau tadah hujan yang kualitasnya sering tidak memenuhi standar kesehatan. c. Kualitas dan Kuantitas Sumber Air - Beberapa pulau memiliki keterbatasan sumber air tawar. - Pencemaran lingkungan (limbah rumah tangga atau laut) menurunkan kualitas air d. SDM (Sumber Daya Manusia) - Keterbatasan jumlah tenaga teknis yang menguasai pengelolaan dan perencanaan air bersih. - Kapasitas kompetensi (perencanaan jaringan, pemeliharaan instalasi, teknologi pengolahan air) belum merata. - Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai 2. Permasalahan dan Hambatan eksternal a. Keterbatasan Sumber Air Baku - Wilayah hinterland memiliki ketersediaan air baku yang terbatas dan kualitasnya bervariasi, sehingga sulit dijadikan bahan baku air bersih. b. Pertumbuhan Penduduk & Kebutuhan Air yang Tinggi - Laju pertumbuhan permukiman baru lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur air bersih. c. Kondisi Geografis Kepulauan - Sebaran wilayah hinterland yang terpisah pulau-pulau kecil menambah kompleksitas biaya dan teknis distribusi. d. Ketergantungan pada Pihak Ketiga (BP Batam / Swasta) - Kewenangan penyediaan air sebagian dikelola oleh badan lain, sehingga koordinasi antar instansi belum selalu sinkron. e. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah - Masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya penghematan dan pemeliharaan fasilitas air bersih. f. Cuaca & Perubahan Iklim - Musim kemarau panjang sering mengurangi ketersediaan air baku dan memicu krisis air.
2	Belum Optimalnya Pelayanan Air Limbah Domestik di Wilayah Hinterland	1. Permasalahan dan Hambatan Internal a. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Limbah - Belum tersedianya jaringan perpipaan air limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan fasilitas septik komunal di sebagian besar wilayah hinterland. b. Keterbatasan Anggaran - Dana pembangunan dan operasional infrastruktur pengelolaan air limbah masih minim dibandingkan kebutuhan. c. Sistem Data & Monitoring Lemah - Belum ada basis data yang terintegrasi mengenai kondisi sanitasi dan air limbah di hinterland, sehingga sulit menyusun perencanaan yang akurat. 2. Permasalahan dan Hambatan Eksternal a. Pola Pemukiman & Pertumbuhan Penduduk - Pemukiman di hinterland cenderung menyebar, tidak terencana, dan kepadatan rendah sehingga membuat pembangunan sistem perpipaan terpusat kurang efisien. b. Kondisi Geografis Kepulauan - Wilayah hinterland terdiri dari pulau-pulau kecil yang terpisah, menambah tantangan teknis dan biaya untuk membangun serta mengoperasikan sistem pengelolaan limbah. c. Perilaku & Kesadaran Masyarakat - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehat, masih banyak praktik pembuangan langsung ke laut/sungai. d. Ketergantungan pada Septik Tank Individual - Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan septic tank rumah tangga yang tidak memenuhi standar, sehingga berpotensi mencemari tanah dan air tanah. e. Keterbatasan Regulasi & Penegakan - Aturan teknis pengelolaan limbah domestik belum sepenuhnya diterapkan dan penegakan hukum masih lemah. f. Dukungan Pihak Ketiga Masih Terbatas



No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
		- Keterlibatan swasta dan lembaga non-pemerintah dalam investasi dan operasional sistem sanitasi di hinterland masih rendah. f. Dampak Lingkungan & Iklim - Perubahan iklim memicu pasang surut dan banjir rob yang memperburuk pencemaran akibat sistem sanitasi yang belum memadai.
3	Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang	1. Permasalahan dan Hambatan Internal - Keterbatasan Data dan Peta Tata Ruang Terintegrasi - Belum adanya basis data spasial yang mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses untuk monitoring pemanfaatan ruang. - Koordinasi Antar-Bidang Belum Optimal - Sinkronisasi internal (perencanaan, pengendalian, dan pengawasan) masih lemah sehingga pemanfaatan ruang tidak terpantau secara efektif. - SDM Perencana dan Pengawas Terbatas - Keterbatasan tenaga teknis di bidang perencanaan tata ruang serta pengendalian/pengawasan pemanfaatan ruang. - Keterbatasan Anggaran - Dana untuk kegiatan pengendalian, pemetaan, dan penegakan aturan pemanfaatan ruang masih kurang dibanding kebutuhan. - Pemanfaatan Teknologi Rendah - Belum maksimalnya penggunaan sistem informasi geospasial, digitalisasi tata ruang, serta aplikasi pemantauan berbasis teknologi. 2. Permasalahan dan Hambatan Eksternal - Tingkat Kepatuhan Masyarakat Rendah - Banyak aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang karena lemahnya kesadaran hukum. - Pertumbuhan Penduduk dan Investasi yang Cepat - Laju urbanisasi, pertumbuhan permukiman, dan investasi lebih cepat daripada pembaruan RTR dan kapasitas pengendalian. - Keterbatasan Koordinasi Antar Lembaga - Belum sinkronnya kewenangan antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan instansi lain terkait pemanfaatan ruang. - Tumpang Tindih Regulasi dan Kewenangan - Masih ada perbedaan kebijakan pusat, daerah, dan BP Batam terkait pengaturan tata ruang, sehingga implementasi di lapangan tidak seragam. - Tekanan Ekonomi dan Sosial - Dorongan masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan demi kebutuhan ekonomi sering kali mengabaikan kesesuaian RTR. - Kurangnya Partisipasi Publik - Masyarakat dan investor kurang dilibatkan dalam proses perencanaan maupun sosialisasi tata ruang, sehingga kepatuhan rendah. - Faktor Geografis dan Lingkungan - Sebagian wilayah memiliki keterbatasan daya dukung lingkungan (rawan banjir, abrasi, kawasan lindung), namun masih digunakan untuk pembangunan.
4	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan berpengaruh terhadap kenyamanan, aksesibilitas, serta daya saing kota	1. Permasalahan dan Hambatan Internal - Keterbatasan Anggaran - Kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan pagu yang tersedia. - Kapasitas SDM Terbatas - Jumlah dan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pengawasan, serta pengendalian pembangunan infrastruktur masih belum merata. - Perencanaan Belum Terintegrasi - Program pembangunan infrastruktur antar bidang/subsektor (air bersih, air limbah komunal) belum sepenuhnya sinkron. - Kelemahan Sistem Monitoring & Evaluasi - Belum maksimal pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk memantau kondisi infrastruktur dan mengevaluasi kinerja layanan. - Koordinasi Internal Kurang Optimal - Masih ada sekat birokrasi antar bagian di lingkungan CKTR sehingga pelaksanaan program sering tidak sinkron. 2. Permasalahan/Hambatan Eksternal - Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Cepat - Laju pertumbuhan permukiman dan jumlah penduduk lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur. - Pemerataan Infrastruktur Kurang - Infrastruktur lebih banyak terkonsentrasi di pusat kota, sementara wilayah pinggiran dan hinterland tertinggal.



No	Aspek	Permasalahan/Hambatan
		c. Tumpang Tindih Kewenangan - Adanya pembagian kewenangan antara Pemko Batam, BP Batam, dan instansi pusat kadang menyebabkan keterlambatan atau tumpang tindih program pembangunan. d. Keterbatasan Lahan - Keterbatasan ruang kota (lahan permukiman, transportasi, dan ruang terbuka hijau) menjadi kendala untuk pengembangan infrastruktur baru. e. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Rendah - Kurang mendukung pemeliharaan infrastruktur (fasilitas publik yang cepat rusak). f. Ketergantungan pada Pihak Ketiga - Beberapa infrastruktur strategis dikelola swasta/BP Batam, sehingga koordinasi, pemeliharaan, dan pemerataan terkadang tidak selaras dengan kebutuhan Pemko. g. Faktor Lingkungan dan Iklim - Rawan banjir, rob, dan perubahan iklim menimbulkan beban tambahan pada infrastruktur perkotaan.
5	Penyelenggara jasa konstruksi saat ini masih belum optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan	1. Permasalahan dan Hambatan Internal a. Kapasitas SDM Jasa Konstruksi Terbatas - Jumlah dan kompetensi tenaga ahli/teknis di bidang konstruksi belum merata, termasuk dalam aspek manajemen proyek, pengawasan mutu, dan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja). b. Keterbatasan Anggaran & Efisiensi - Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa konstruksi masih belum sebanding dengan kebutuhan, ditambah efisiensi pelaksanaan belum optimal. c. Kualitas Perencanaan & Pengawasan Belum Maksimal - Masih ada gap antara dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan, serta pengawasan proyek yang kadang kurang ketat. d. Penggunaan Teknologi Rendah - Pemanfaatan teknologi konstruksi modern, Building Information Modeling (BIM), dan sistem digitalisasi proyek masih terbatas. 2. Permasalahan/Hambatan Eksternal a. Kapasitas Pelaku Usaha Konstruksi Bervariasi - Tidak semua kontraktor, konsultan, atau penyedia jasa konstruksi memiliki kompetensi dan standar mutu yang sama. b. Ketergantungan pada Pihak Ketiga - Banyak proyek strategis melibatkan pihak swasta atau BP Batam, sehingga koordinasi tidak selalu sejalan dengan kebutuhan Pemko. c. Regulasi dan Perizinan yang Kompleks - Proses pengadaan, perizinan, dan regulasi jasa konstruksi kadang berbelit, menunda pelaksanaan proyek. d. Minimnya Inovasi & Teknologi Ramah Lingkungan - Praktik konstruksi berkelanjutan (green construction) masih belum banyak diterapkan. e. Fluktuasi Harga Material & Ketersediaan - Harga material konstruksi yang tidak stabil dan keterbatasan pasokan berdampak pada kualitas serta ketepatan waktu proyek. f. Kesadaran terhadap Aspek Keamanan & Keberlanjutan Rendah - Sebagian pelaku jasa konstruksi masih menomorsatukan biaya murah dibanding aspek keamanan, mutu, dan keberlanjutan. g. Faktor Sosial & Lingkungan - Penolakan masyarakat, keterbatasan lahan, serta tantangan kondisi geografis Batam (rawan banjir/abrasi) dapat menghambat pelaksanaan proyek.

2.4.2. Isu Strategis Tahun 2027

Isu strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 merupakan kondisi atau permasalahan yang bersifat penting, mendesak, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian



tujuan pembangunan daerah maupun kinerja perangkat daerah. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, capaian target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025–2029, arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta perkembangan lingkungan strategis yang memengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Perkembangan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, pusat investasi, industri, pariwisata, dan jasa menuntut tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat mengharuskan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor air minum, sanitasi, bangunan gedung, jasa konstruksi, dan penataan ruang

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029, isu-isu penting/strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi adalah meliputi :

1. Meningkatkan dan mempertahankan kenyamanan prasarana serta sarana bangunan, baik bangunan pemerintah maupun fasilitas pelayanan masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan tata ruang antara penyelenggaraan tata ruang nasional, provinsi dan kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang.
3. Menyelaraskan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah hinterland.
4. Penyelenggaraan Cipta Karya ke depan diharapkan tidak lagi terhambat oleh sistem yang birokratis dan kurang fleksibel, serta mampu meningkatkan kapasitas inovasi dan kreativitas
5. Kegiatan pengelolaan infrastruktur saat ini masih lebih terfokus pada aspek pembangunan, sementara aspek pemanfaatan dan pengembangan aset belum mendapatkan perhatian yang memadai
6. Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang masih menghadapi keterbatasan kualitas yang perlu ditingkatkan guna menjawab tuntutan tugas dan pelayanan publik

Keenam isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tidak terkecuali pada perencanaan program kegiatan Tahun 2027

2.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, tidak terdapat usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan atau dialokasikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Dengan demikian, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027



sepenuhnya mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, RKPD Kota Batam Tahun 2027, Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terus mendorong pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi pelayanan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bidang cipta karya, penataan ruang, jasa konstruksi, air minum, dan air limbah

Melalui pengembangan inovasi pelayanan tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Penguatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ada pun inovasi dimaksud sesuai dengan bidang urusan diantaranya adalah :

a. UPT. Pengelolaan Air Bersih

- SIMANAB : Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Air Bersih
- SCADA : Aplikasi Sistem Konfigurasi dan Monitoring SWRO
- Tagihan.blud-air.com : Aplikasi sistem pembayaran
- bludAir : Aplikasi pengecekan tagihan oleh Pelanggan
- bludAirScanner : aplikasi pencatatan meteran
- Media Massa Online seperti Instagram, Facebook dan Website

b. Sekretariat

- Digitalisasi Perencanaan dan Monitoring Program, melalui pengembangan dashboard perencanaan dan monitoring yang menyajikan informasi mengenai target kinerja, realisasi fisik dan keuangan, capaian indikator, serta progres pelaksanaan kegiatan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi (Google Spreadsheet)
- Media Massa Online seperti Instagram, Facebook dan Website

c. Bidang Bina Konstruksi

- Sijakon : data base/informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap informasi jasa konstruksi cakupan Kota Batam
- Inovasi pelayanan berupa kerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh dalam penyelenggaraan pembekalan, pelatihan, dan fasilitasi uji sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi. Bertujuan untuk memperluas akses masyarakat dan tenaga kerja konstruksi di Kota Batam terhadap layanan sertifikasi kompetensi yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

d. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah

- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Air Bersih dan Air Limbah Domestik di kawasan Hinterland



- Pesona Hinterland Kota Batam dilakukan melalui penguatan basis data layanan air limbah domestik, pemetaan wilayah prioritas, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur
- e. Bidang Prasarana Bangunan Gedung
 - Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengembangkan inovasi pelayanan melalui optimalisasi pelayanan PBG berbasis percepatan, pendampingan, dan pengawasan kepatuhan perizinan bangunan gedung.

Sedangkan inovasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan bidang urusan diantaranya adalah :

- a. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah
 - Permata Hinterland : penyediaan Air Minum Berbasis SPAM Jaringan Perpipaan melalui Teknologi Desalinasi Air Laut untuk Masyarakat Hinterland Kota Batam. Inovasi ini merupakan solusi terhadap keterbatasan sumber air baku di pulau-pulau kecil yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.
- b. Sekretariat
 - Basis Data Satu Pintu (One Data CKTR) pada clouds yakni sistem pengelolaan data terintegrasi yang menghimpun seluruh data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja perangkat daerah dalam satu platform yang mudah diakses sesuai kewenangan masing-masing pengguna yang gunanya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan perangkat daerah menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Adapun sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara terukur sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2027. Adapun tujuan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastruktur dasar. Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih dan air limbah domestik;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan;
3. Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
I	Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastuktur dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang	80.29
1.1.	Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik.	58.26 %
1.2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	90.87
1.3.	Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	85 %
1.4.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rasio kepatuhan PBG	97.6



Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Seluruh indikator tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran Tahun 2027 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

3.2. Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusannya mengacu pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027, RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta kebijakan nasional dan daerah lainnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur/keciptakarya dan penataan ruang. Sinkronisasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, sekaligus memenuhi target pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Pembangunan tahun 2027 berada pada tahap jangka menengah yang ke enam yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2027

Dalam merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029. Penyusunannya mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, penataan ruang, penataan bangunan gedung, jasa konstruksi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaannya juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kemampuan keuangan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Prioritas pelaksanaan program pada Tahun 2027 meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan air minum, melalui pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), khususnya pada wilayah yang belum terlayani di kawasan hinterland, guna meningkatkan cakupan akses air minum layak.
- b. Peningkatan pelayanan air limbah domestik, melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur, penguatan pengelolaan air limbah domestik, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air limbah domestik yang layak dan aman.
- c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, melalui penyusunan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengawasan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan jasa konstruksi, melalui pembinaan, pengawasan, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, serta penguatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penguatan tata kelola perangkat daerah, melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, administrasi perkantoran, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi pelayanan, melalui digitalisasi proses bisnis, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.



Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027 selanjutnya dituangkan secara rinci dalam tabel Renja Perangkat Daerah sesuai format yang ditetapkan dalam ketentuan penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2027. Tabel tersebut memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, sumber pendanaan, lokasi, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tahun 2027 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengusulkan enam (6) program, tujuh belas (17) kegiatan, empat puluh tiga (43) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 254.584.886.622,- (dua ratus lima puluh empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah). Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - c. Pembangunan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - e. Perluasan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 2.1 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan :
 - a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.1.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.2.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3.3 Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.3.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3.4 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.4.1 Sub Kegiatan :



- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.5 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.5.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.6 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.6.1 Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.7 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.7.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.8 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.8.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3.9 Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 3.9.1 Sub Kegiatan :
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 4.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
 - 4.1.1 Sub Kegiatan :
 - a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
 - 4.2 Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
 - 4.2.1 Sub Kegiatan :



- a. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - c. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- 4.3 Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3.1 Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - b. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
 - c. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
- 5. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 5.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 5.1.1 Sub Kegiatan :
 - a. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- 6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 6.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 6.1.1 Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
 - 6.2 Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - 6.2.1 Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 - c. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025-2029 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan enam (6) program, tujuh belas (17) kegiatan dengan empat puluh empat (44) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Duk ung an	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas				Targe t	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
I					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			254.584.886.622								165.950.000.382			
I	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			254.584.886.622								165.950.000.382			
					DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM			254.584.886.622								165.950.000.382			
I	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,93	90.87 Poin	165.950.000.382							90.9 0	36.629.751.873	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
						Nilai SAKIP PD	79,33	75.33 Angka											
I	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persentase	1.042.000							100	111.000.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	416,800	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Pemerintah Kota	6	65.500.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	625.200	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Pemerintah Kota	12	45.500.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persentase	24.119.189.958							100	26.861.015.944	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		165 Orang/bulan	23.866.589.958	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Pemerintah Kota	165	26.531.810.480	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	252.600.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Pemerintah Kota	12	329.205.464	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data BMD dalam KIB		100 Persentase	0							100	125.500.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	0	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Pemerintah Kota	12	125.500.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Duk ung an	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas						
												Nasional	Provinsi			Daerah		
I	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 Persentase	228.583.600							100	329.065.550	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	172.808.600	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	144.117.050	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	55.775.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	184.948.500	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persentase	252.115.900							100	789.515.752	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.355.300	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	5.914.964	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	150.719.600	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	287.726.263	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	25.000.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.000.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	7.986.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	0	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	23.958.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	72.041.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	438.930.525	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persentase	1.995.501.500							100	835.448.735	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	641.208.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	0	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	760.140.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	288.934.811	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam



Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Duk ung an	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi	Daerah					
I	03	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		35 Unit	594.153.500	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	35	546.513.924	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persentase	492.295.956								100	713.059.447	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	450.300.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	12	662.545.180	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	41.995.956	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	12	50.514.267	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persentase	952.659.700								100	1.306.141.445	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	84.630.000	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	1	103.498.560	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	438.680.200	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	20	820.219.965	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		64 Unit	50.550.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	64	57.392.720	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	378.799.500	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	1	325.030.200	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan		56.23 Persentase	5.500.000.000								57,88	5.559.005.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	5.500.000.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	1	5.559.005.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	59,53	56.23 Persentase	44.486.723.696								57,88	55.268.647.895	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam



Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Duk ung an	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
I	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam		1000 jiwa	44.486.723.696							1000	55.268.647.895	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam	
I	03	03	2,01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		2 Dokumen	333.000.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	- SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	727.756.182	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	03	2,01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		5 Liter/Detik	9.198.198.150	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	- Stu ntin g	Pemerintah Kota dan Masyarakat	5	10.774.081.093	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	03	2,01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		2 . 5 Liter/Detik	20.570.520.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	- Stu ntin g	Pemerintah Kota dan Masyarakat	2.5	24.106.539.503	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	03	2,01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		37 Unit	12.900.380.546	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	- Ke mis kina n	Pemerintah Kota dan Masyarakat	39	18.686.533.345	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	03	2,01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		240 SR	1.484.625.000	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	- SPM	Pemerintah Kota dan Masyarakat	240	973.737.772	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	62,93	60.28 Persentase	5.426.235.000								61.6 1	5.560.115.792	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	05	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK		800 jiwa	5.426.235.000								800	5.560.115.792	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	05	2,01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		4,24 M3/Hari	5.426.235.000	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	- SPM	Pemerintah Kota	4,24	5.560.115.792	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	83,33	50 Persentase	165.955.512.812								66.6 7	62.749.916.544	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Jumlah Unit Bangunan Daerah Yang Ditangani (Dibangun, Dipelihara,		440 unit	165.955.512.812								440	62.749.916.544	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam



Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Duk ung an	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
					Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Direhabilitasi/ Revitalisasi dan Diawasi													
I	03	08	2,01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		15 Bangunan Gedung	61.596.729.320	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	15	30.602.983.053	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	08	2,01	0018	Pemeliharaan dan Perawatan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		3 Bangunan Gedung	10.144.798.880	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	3	9.547.661.116	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	08	2,01	0021	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		15 Dokumen	93.718.550.912	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	15	22.069.540.119	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	08	2,01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		407 Dokumen	495.433.700	K o t a Batam	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	407	529.732.256	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	11			PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	83,33	50 Persentase	676.411.900								66.6 7	944.759.439	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
						Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan	81,82	45.45 Persentase										63.6 4	
I	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina		400 orang	596.583.400								400	599.966.939	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	11	2,01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		350 Orang	475.776.200	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	300	453.425.505	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	11	2,01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		19 Lembaga	120.807.200	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	19	146.541.434	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100 Laporan	79.828.500								100	344.792.500	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam



Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Duk ung an	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah	Targe t		Pagu Indikatif
I	03	11	2,04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		80 Paket Pekerjaan	79.828.500	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerinta h Kota	80	132.612.500	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	83,01	49.04 Persentase	4.498.614.600								66.0 3	4.796.808.839	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan		403 Dokumen	3.149.767.600								403	3.357.716.819	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		401 Dokumen	1.083.268.600	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	401	993.734.280	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota		2 Dokumen	2.066.499.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	2	2.363.982.539	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Dalam Sosialisasi Publik		50 orang	55.480.000								1	132.300.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		1 Kegiatan	55.480.000	K o t a Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	132.300.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruag Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Dokumen Hasil Monev Wilayah Perencanaan		2 Dokumen	1.113.267.000								2	1.083.049.674	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		1 Dokumen	787.100.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	923.187.174	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	326.167.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	159.862.500	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5 Dokumen	180.100.000								5	223.742.346	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Keiatan Pemanfaatan Ruang		5 Dokumen	115.878.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	5	203.942.346	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
I	03	12	2,04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		1 berita acara	64.222.000	Kota Batam	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Iktif serta mengembangkan Agromaritim	Prioritas Provinsi 2 Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	Prioritas Kota Batam 5 Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	19.800.000	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
					TOTAL:			254.584.886.622								165.950.000.382			



Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027

4.2. Dukungan Program RKPD 2027 Untuk Program Nasional dan Program Provinsi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.

Dukungan terhadap program nasional diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam peningkatan akses terhadap pelayanan air minum layak dan aman, pengelolaan air limbah domestik. Program-program tersebut mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan ketahanan lingkungan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak).

Dukungan terhadap program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau diwujudkan melalui sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan. Sinergi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah provinsi, pemerintah pusat, Badan Pengusahaan Batam, serta instansi vertikal sesuai dengan kewenangan masing-masing

Tabel 4.2.
Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
Mengurangi Beban Pengeluaran									38.897.135.546
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					33.470.900.546
			1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				33.470.900.546
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Dengan Satuan:Liter /Detik)	2.5	20.570.520.000	
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	35	12.900.380.546	
			1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH MINUM					5.426.235.000
			1.03.05.2.01.0049		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.426.235.000
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (Dengan Satuan:M3/Hari)	4.24	5.426.235.000	

Tabel 4.3
Pendukung Program Strategis Nasional

No	ProSN	Indikator	Proyek /Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikator	Unit SKPD Penanggungjawab
1		Pembangunan 3 Juta Rumah	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan	406 Dokumen	495.433.700	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang



No	ProSN	Indikator	Proyek / Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikator	Unit SKPD Penanggungjawab
					Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			

Tabel 4.4.
Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan/Program	Pagu Dana Rkpd 2027	Perangkat Daerah Pengampu
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.426.235.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	44.486.723.696	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Total Keseluruhan		49.912.958.696	

Tabel 4.5.
Pendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
1	2	3	4
	10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	44.486.723.696	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.426.235.000	

Tabel 4.6.
Pendukung Prioritas Presiden RI

No	17 Program Prioritas	Program Pada Rkpd	Indikator Program 2027	Target 2027	Pagu Program Pada Rkpd 2027	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Swasembada Pangan, energi dan air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih (Dengan Satuan:Persentase)	54,57%	44.486.723.696	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,28%	5.426.235.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang



Tabel 4.7.
Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No	SPM	Perangkat Daerah	Program RKPD 2027	Pagu Indikatif RKPD 2027
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari;	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	44.486.723.696
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.426.235.000
Total Keseluruhan				49.912.958.696

Tabel 4.8.
Pendukung Program Percepatan Penurunan Stunting

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu 2027	Pengampu
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				34.955.525.546	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			34.955.525.546	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20.570.520.000	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	12.900.380.546	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.484.625.000	
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				5.426.235.000	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.426.235.000	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5.426.235.000	
Total Keseluruhan					40.381.760.546	

Melalui sinergi antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berkomitmen mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pelayanan dasar yang semakin baik, penataan ruang yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Batam



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sampai dengan tahun 2027 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal, meningkatkan kualitas jasa konstruksi, serta mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Pada bidang air minum, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan akses pelayanan air minum layak, terutama bagi masyarakat di wilayah hinterland melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi sarana yang telah terbangun, serta operasional rutin. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber air baku, kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan pendanaan, serta kebutuhan peningkatan cakupan pelayanan pada kawasan yang belum terlayani secara optimal. Pada bidang pengelolaan air limbah domestik, kinerja diarahkan pada peningkatan akses sanitasi layak dan aman melalui pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik, peningkatan kualitas pengelolaan instalasi pengolahan air limbah, serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Permasalahan yang masih dihadapi meliputi rendahnya cakupan pelayanan sistem terpusat, keterbatasan anggaran pembangunan dan operasional, serta perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas sanitasi.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, capaian kinerja ditunjukkan melalui peningkatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, serta pembinaan terhadap pemilik dan pelaku pembangunan agar memenuhi ketentuan teknis dan administratif. Tantangan yang masih dihadapi antara lain peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap perizinan bangunan, percepatan proses pelayanan berbasis digital, dan penguatan pengawasan terhadap bangunan yang belum memenuhi ketentuan.

Pada bidang jasa konstruksi, kinerja difokuskan pada pembinaan penyedia jasa konstruksi, peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi agar memenuhi standar mutu, keselamatan, keamanan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan. Upaya tersebut mendukung peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja konstruksi di Kota Batam. Pada bidang penataan ruang, penyelenggaraan urusan dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, fasilitasi penyusunan dokumen penataan ruang, pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang, serta koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang. Kinerja ini diharapkan mampu menciptakan pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan perkotaan.

Secara umum, pelaksanaan urusan pemerintahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas



perencanaan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas data sektoral sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran pada Renja Tahun 2027. Penyusunan Renja Tahun 2027 selanjutnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan bangunan gedung dan jasa konstruksi, serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Keberhasilan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator-indikator ini disesuaikan dengan bidang urusan perangkat daerah masing-masing. Indikator-indikator ini membantu suatu instansi atau perangkat daerah untuk tahu apakah tujuan telah tercapai dengan baik.

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. IKU disusun sebagai instrumen pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025–2029.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2027, IKU menjadi acuan utama dalam merumuskan program, kegiatan, subkegiatan, serta target kinerja tahunan. Penetapan target dilakukan berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, proyeksi kebutuhan pembangunan, kemampuan pendanaan daerah, serta arah kebijakan pembangunan tahun 2027.

Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, penataan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, serta tata kelola perangkat daerah. Pengukuran capaian dilakukan secara berkala melalui pemantauan dan evaluasi terhadap indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun IKU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2027 meliputi:

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun-			
			2026	2027	2028	2029
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang	Indeks	79,36	80,29	81,25	82,18



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun-			
			2026	2027	2028	2029
2	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik.	Persentase	56,77	58,26	59,75	61,23
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Nilai	90.84	90.87	90.90	90.93
4	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase	84,00	85,00	86,00	87,00
5	Rasio kepatuhan PBG	Rasio	97,3	97,6	98	98,3

Keberhasilan pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan yang terarah, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, serta pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029.

Keberhasilan pencapaian IKU juga tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui peningkatan akses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatnya kepatuhan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan jasa konstruksi, meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatnya kualitas tata kelola organisasi. Hasil pencapaian tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah baik sekaligus melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. IKK digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029 serta selaras dengan indikator kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan capaian utama penyelenggaraan urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, meliputi peningkatan cakupan pelayanan air minum layak, pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, peningkatan kualitas penataan ruang, serta



penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik secara efektif dan akuntabel.

Hasil pengukuran IKK menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Indikator Kinerja Kunci tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan organisasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun-			
			2026	2027	2028	2029
1	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi	Persentase	54,57	56,23	57,88	59,53
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	58,96	60,28	61,61	62,93
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persentase	97,30	97,60	98,00	98,30
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi perator/teknisi/ analis	Persentase	50,00	66,67	83,33	99,33
5	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan peraturan perundang undangan	Persentase	45,45	45,45	63,64	81,82
6	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Persentase	14	13	12	11
7	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persentase	45	50	55	60

5.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM menjadi salah satu instrumen untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar secara merata, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penerapan SPM berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Berdasarkan kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, indikator SPM yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah berada pada Urusan Pekerjaan Umum, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2027, pencapaian indikator SPM diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, khususnya melalui pengembangan jaringan SPAM, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan air minum, serta peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sesuai standar teknis. Upaya tersebut dilaksanakan melalui perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, prioritas wilayah pelayanan, serta sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BP Batam, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan SPM juga menjadi dasar dalam penyusunan target kinerja tahunan, pengalokasian anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan pemerataan akses infrastruktur dasar, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan target pembangunan nasional di bidang pekerjaan umum.

Tabel 5.3.
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Satuan	Target Tahun-			
				2026	2027	2028	2029
1	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	Rumah Tangga	250	250	250	250
2	Persentase penduduk yang terlayani air limbah domestik	Rumah tangga yang menggunakan sanitasi	Rumah Tangga	200	200	200	200



BAB VI PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas enam program, tujuh belas kegiatan dan empat puluh tiga sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Dokumen Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Dokumen Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,



transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Dokumen Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Dokumen Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Dokumen Renja Tahun 2027.

Demikian Dokumen Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

